

RESPONS TERHADAP POIN-POIN REVISI DOSEN PENGUJI

Ujian Penilaian Kelayakan Disertasi

1 Mei sampai 25 Mei 2026

No	Poin-poin Revisi	Respons	Halaman
Dosen Penguji: Bapak Prof. Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sc.			
1.	Hasil penilaian: Naskah disertasi layak untuk seorang calon doktor. Catatan: 1. Perbaikan minor dapat dilakukan terutama untuk mengisi kekurangan halaman abstrak. 2. Perlu menjelaskan makna koefisien dari model yang sdr bangun di halaman 90-94 (Tabel 4.9 dan table 4.10) dan bukan hanya sekedar berpengaruh positif atau negative serta signifikaninya saja. 3. Saran/implikasi kebijakan juga disesaikan dengan tujuan penelitian nomor berapa agar konsistensinya tetap terjaga.	Abstrak telah ditambahkan di naskah disertasi Interpretasi hasil disajikan di sub bab 4.3 Pembahasan Saran telah direvisi dengan tujuan penelitian 1. Pemerintah desa perlu memperkuat modal sosial masyarakat melalui program yang lebih konkret dan terarah. Dalam aspek musyawarah, pemerintah desa perlu membangun forum musyawarah desa yang lebih inklusif dengan melibatkan kelompok miskin, perempuan, petani kecil, pelaku usaha mikro, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Forum ini tidak hanya menjadi kegiatan formal, tetapi perlu	ix dan x 99-135 148-149

No	Poin-poin Revisi	Respons	Halaman
		diarahkan untuk memetakan kebutuhan warga miskin, menentukan prioritas program penurunan kemiskinan, serta memastikan alokasi anggaran desa lebih tepat sasaran. Selain itu, partisipasi gotong royong dan menjaga lingkungan dapat diarahkan pada kegiatan padat karya desa, perbaikan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan, bank sampah, serta perbaikan fasilitas umum yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin. 2. Pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas program pengurangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran. Langkah nyata dapat dilakukan dengan memperbarui data keluarga miskin secara berkala, melakukan verifikasi data melalui musyawarah dusun, dan menyusun program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Pemerintah desa juga perlu mengalokasikan APBDes untuk program pemberdayaan ekonomi, bantuan modal produktif, pelatihan keterampilan, serta kegiatan padat karya desa. Agar pelaksanaannya lebih terukur, pemerintah desa dapat membentuk tim khusus pengentasan kemiskinan desa yang bertugas merancang program, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi hasil program secara terbuka kepada masyarakat. 3. Pemerintah desa perlu berperan aktif dalam memfasilitasi kekuatan sosial masyarakat dengan kebijakan pengurangan kemiskinan. Pemerintah desa dapat memperkuat koperasi desa dan BUMDes melalui dukungan regulasi desa, bantuan legalitas kelembagaan, pelatihan pengelolaan koperasi, pendampingan usaha, akses permodalan, serta kerja sama pemasaran produk lokal. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat	

No	Poin-poin Revisi	Respons	Halaman
		miskin. Pemerintah desa juga perlu menjadikan hasil musyawarah inklusif sebagai dasar penyusunan APBDes, sehingga modal sosial yang ada di masyarakat dapat dimediasi melalui kebijakan desa yang lebih nyata dan berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan.	
Dosen Penguji: Ibu Heni Wahyuni, S.E., M.Ec.Dev., Ph.D.			
1.	Hasil penilaian: Naskah disertasi layak untuk seorang calon doktor. Catatan akan ditanyakan pada saat ujian tertutup		
Dosen Penguji: Ibu Eny Sulistyaningrum, S.E., M.A., Ph.D.			
1.	Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka - Perkuat keterkaitan teori dengan konteks lokal^[1]. Study ini sudah mengutip banyak literatur internasional (Grootaert, Narayan, Knack), tetapi perlu ditunjukkan bagaimana teori tersebut relevan dengan karakteristik sosial budaya Jawa Tengah. Misalnya, gotong royong dan musyawarah bisa diposisikan sebagai dimensi unik modal sosial khas Indonesia.	Tradisi lokal di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kolektif, yang direpresentasikan melalui praktik-praktik seperti gotong royong (Bowen, 1986; Koentjaraningrat, 1961), rukun warga dan musyawarah (Bowen, 1986), serta kerja bakti (Beard, 2005). Praktik-praktik ini merupakan bentuk nyata dari modal sosial lokal, karena membangun <i>trust</i>, <i>reciprocity</i>, <i>social networks</i>, dan <i>collective action</i>, sesuai dengan kerangka teori modal sosial. Gotong royong dan kerja bakti menegaskan norma timbal balik dan solidaritas, sementara rukun warga dan musyawarah memperkuat jaringan sosial dan koordinasi kolektif. Integrasi ini menunjukkan bahwa modal sosial lokal tidak hanya menjadi indikator empiris dari keterikatan sosial masyarakat, tetapi juga	37-38

No	Poin-poin Revisi	Respons	Halaman
	- Kebaruan penelitian: Tegaskan celah penelitian terdahulu yang belum terjawab. Misalnya, apakah peran pemerintahan desa sebagai moderator hubungan modal sosial dengan kemiskinan belum banyak dikaji? Jika iya, jadikan ini sebagai kontribusi utama.	menegaskan relevansi teori Grooetaert (2001), Narayan & Cassidy (2001), dan Knack & Keefer (1997) dalam konteks budaya lokal Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memvalidasi praktik sosial lokal sebagai modal sosial yang berkontribusi pada penguatan kapasitas masyarakat dan potensi pengurangan kemiskinan perdesaan. Dimensi resiprositas dalam modal sosial secara khas tercermin dalam nilai-nilai sosiobudaya gotong-royong, yang merepresentasikan bentuk saling membantu yang bersifat timbal balik, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Nilai ini masih berfungsi sebagai norma sosial yang dominan dan memainkan peran penting sebagai determinan utama dalam pembentukan modal sosial di masyarakat Indonesia (Bowen, 1986). Berikut hubungan dimensi modal sosial penelitian dengan dimensi sosial yang dikemukakan oleh Narayan dan Cassidy (2001). Modal sosial merupakan konsep penting dalam menjelaskan hubungan antara kehidupan sosial masyarakat dan pembangunan. Dalam kajian klasik, modal sosial banyak merujuk pada pemikiran Bourdieu (1986), Coleman (1988), dan Putnam (1993; 2000). Bourdieu (1986) memandang modal sosial sebagai sumber daya yang melekat dalam jaringan sosial dan dapat dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan tertentu. Coleman (1988) menjelaskan modal sosial sebagai bagian dari struktur sosial yang dapat memfasilitasi tindakan individu maupun kolektif. Sementara itu, Putnam (1993; 2000) menekankan modal sosial sebagai jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Meskipun banyak penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara modal sosial dan kemiskinan perdesaan, kajian	49-53

No	Poin-poin Revisi	Respons	Halaman
		yang menggunakan dimensi lokal sesuai karakter masyarakat desa Indonesia masih terbatas. Modal sosial dalam konteks Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari jaringan sosial, norma, dan kepercayaan, tetapi juga dari praktik sosial yang hidup dalam masyarakat, seperti gotong royong dan musyawarah. Kedua praktik tersebut sangat melekat dalam kehidupan desa, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, namun belum banyak ditempatkan sebagai dimensi modal sosial yang diuji secara empiris dalam hubungannya dengan kemiskinan. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini mengembangkan konsep modal sosial yang lebih sesuai dengan konteks desa Indonesia. Modal sosial dalam penelitian ini direpresentasikan melalui empat dimensi, yaitu koperasi, musyawarah, partisipasi gotong royong, dan partisipasi menjaga lingkungan. Keempat dimensi ini dipilih karena mencerminkan bentuk kerja sama, partisipasi, kelembagaan lokal, dan tanggung jawab sosial masyarakat desa. Koperasi diposisikan sebagai dimensi ekonomi kolektif. Koperasi mencerminkan kerja sama masyarakat dalam memperkuat akses ekonomi, permodalan, kegiatan usaha, dan solidaritas ekonomi lokal. Melalui koperasi, masyarakat desa memiliki wadah untuk mengembangkan kegiatan produktif dan memperkuat kemampuan ekonomi secara bersama-sama. Musyawarah diposisikan sebagai dimensi deliberatif. Musyawarah menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, membahas kebutuhan desa, menentukan prioritas pembangunan, dan membangun kesepakatan bersama. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, musyawarah penting karena dapat membantu pemerintah desa merancang program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Partisipasi gotong royong diposisikan sebagai dimensi aksi kolektif. Gotong royong menunjukkan kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama secara sukarela dalam	

No	Poin-poin Revisi	Respons	Halaman
		menyelesaikan persoalan bersama. Praktik ini dapat membantu masyarakat menghadapi keterbatasan sumber daya, misalnya dalam pembangunan fasilitas desa, perbaikan lingkungan, atau kegiatan sosial kemasyarakatan. Partisipasi menjaga lingkungan diposisikan sebagai dimensi tanggung jawab sosial-ekologis. Dimensi ini menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan, kelestarian, dan keberlanjutan lingkungan desa. Lingkungan yang terjaga dapat mendukung kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan sumber penghidupan di desa. Selain mengembangkan dimensi modal sosial, penelitian ini juga memasukkan pemerintahan desa sebagai variabel moderasi. Pemerintahan desa dipandang penting karena memiliki peran dalam mengelola pembangunan, memfasilitasi partisipasi masyarakat, dan menghubungkan aspirasi warga dengan kebijakan desa. Dengan adanya pemerintahan desa, hubungan antara modal sosial dan kemiskinan dapat menjadi lebih kuat atau lebih lemah, tergantung pada kondisi pemerintahan desa.	
2	Metodologi Penelitian - Justifikasi pemilihan SEM-PLS^[1] jelaskan mengapa SEM-PLS lebih tepat dibandingkan SEM berbasis covariance atau regresi OLS.	Justifikasi pemilihan SEM PLS telah ditambahkan Pada umumnya estimasi parameter dalam <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM) dilakukan menggunakan pendekatan <i>Covariance-Based SEM</i> (CB-SEM) dengan metode <i>Maximum Likelihood</i> (ML). Pendekatan ini mensyaratkan ukuran sampel yang relatif besar, data berdistribusi normal multivariat, serta model yang didukung oleh landasan teori yang kuat. Namun, dalam penelitian ini digunakan <i>Partial Least Squares Structural Equation Modeling</i> (PLS-SEM) karena memiliki beberapa keunggulan metodologis. Pertama, PLS-SEM tidak mensyaratkan normalitas multivariat yang ketat sehingga lebih sesuai untuk data sosial-ekonomi yang sering kali tidak	65

No	Poin-poin Revisi	Respons	Halaman
		berdistribusi normal. Kedua, PLS-SEM mampu memberikan estimasi yang stabil pada ukuran sampel yang relatif terbatas dibandingkan CB-SEM. Ketiga, metode ini berorientasi pada prediksi (<i>prediction-oriented</i>) dan mampu memaksimalkan varians konstruk endogen, sehingga sangat sesuai untuk menganalisis hubungan antarvariabel yang kompleks dan bersifat eksploratif. Selain itu, PLS-SEM dapat digunakan untuk menguji model yang melibatkan banyak indikator dan konstruk laten secara simultan, serta tetap menghasilkan estimasi yang robust ketika model penelitian masih dalam tahap pengembangan teori. Dengan karakteristik tersebut, PLS-SEM dipandang sebagai metode yang tepat untuk menganalisis hubungan antara dimensi modal sosial dengan kemiskinan yang melibatkan variabel-variabel laten. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hair <i>et al.</i> (2017) bahwa SEM-PLS direkomendasikan ketika tujuan penelitian berfokus pada pengembangan teori, prediksi hubungan antar konstruk, ukuran sampel relatif terbatas, serta ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas multivariat.	56-60
	Definisi operasional variabel. Pastikan indikator setiap dimensi modal sosial (koperasi, musyawarah, gotong royong, menjaga lingkungan) dijelaskan rinci. Misalnya, partisipasi gotong royong diukur dengan frekuensi kegiatan, tingkat kehadiran, atau kontribusi material.	Definisi telah diperbaiki dan dipisahkan dengan satuan indikator yang digunakan. Penjelasan definisi tercantum pada tabel 3.1	61
	Keterbatasan Data Podes dan BPS sering bersifat agregat. Jelaskan keterbatasan ini agar pembaca memahami ruang lingkupnya.	Justifikasi penggunaan Data PODES telah ditambahkan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari	58-60

No	Poin-poin Revisi	Respons	Halaman
		Potensi Desa (PODES) tahun 2018 dan 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). PODES dipilih karena memuat informasi mengenai karakteristik desa/kelurahan, antara lain kondisi infrastruktur, akses layanan dasar, fasilitas sosial-ekonomi, kelembagaan desa, aksesibilitas wilayah, dan potensi pembangunan desa. Dengan cakupan tersebut, PODES dinilai relevan untuk menganalisis hubungan struktural antarvariabel berbasis wilayah melalui pendekatan SEM-PLS. Unit analisis dalam penelitian ini adalah desa. Oleh karena itu, seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian tidak menggambarkan kondisi individu atau rumah tangga, melainkan karakteristik objektif wilayah administratif. Konsekuensinya, hasil penelitian harus ditafsirkan pada level desa/kelurahan dan tidak dapat secara langsung digeneralisasi pada level individu. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan interpretasi berupa <i>ecological fallacy</i>, yaitu penarikan kesimpulan individual berdasarkan data agregat wilayah. Penggunaan data PODES tahun 2018 dan 2020 dimaksudkan untuk memberikan gambaran pelayanan dasar (Pendidikan dan kesehatan) dimensi modal sosial di perdesaan Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Brebes, Banyumas, Tegal, Pati, Batang dan Kudus. Namun, karena hanya menggunakan dua titik waktu, penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai analisis longitudinal penuh. Hasil model SEM-PLS lebih tepat dimaknai sebagai hubungan asosiatif-struktural antar konstruk pada periode pengamatan, bukan sebagai bukti kausalitas yang mutlak. Selain itu, tahun 2020 memiliki konteks khusus karena beririsan dengan periode awal pandemi COVID-19, sehingga perubahan kondisi desa pada periode tersebut perlu ditafsirkan secara hati-hati. Pada penelitian ini, indikator PODES digunakan untuk membangun konstruk	

No	Poin-poin Revisi	Respons	Halaman
		berbasis kondisi objektif wilayah, seperti infrastruktur, akses pelayanan dasar, dan karakteristik dimensi modal sosial. Oleh karena itu, konstruk yang dibangun dari data PODES tidak dipahami sebagai konstruk perseptual atau psikologis, melainkan sebagai konstruk struktural berbasis wilayah. Pemilihan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian teori, relevansi substantif, dan kelayakan statistik. Mengingat banyak indikator PODES berbentuk kategorik, ordinal, atau dummy, maka penentuan model pengukuran dalam SEM-PLS dilakukan secara hati-hati, terutama dalam membedakan indikator reflektif dan formatif.	
3	Analisis dan Pembahasan - Kedalaman interpretasi hasil Jangan berhenti pada signifikansi statistik saja. Misalnya, jika musyawarah berpengaruh signifikan, jelaskan mekanisme sosial-ekonomi yang mendasarinya (akses informasi, solidaritas, distribusi sumber daya). - Peran moderasi pemerintahan desa. Elaborasi lebih dalam dengan contoh empiris. Misalnya, bagaimana kebijakan kepala desa atau BUMDes memperkuat efek koperasi terhadap pengurangan kemiskinan. - Diskusi komparatif, bandingkan hasil penelitian dengan studi lain di Indonesia atau Asia Tenggara.	Interpretasi hasil secara detail ada di sub bab pembahasan 4.3 dan sudah ditambahkan masukan dari penguji. Berdasarkan hasil estimasi SEM-PLS pada tabel 4.9, dapat diketahui bahwa jumlah koperasi aktif memiliki nilai koefisien negatif dan signifikan signifikansi yang artinya bahwa keberadaan koperasi yang dikonstruksikan dengan jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang aktif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan di perdesaan Kabupaten Banyumas, Brebes, Pati, Tegal, Batang, dan Kudus. Temuan ini dapat dijelaskan melalui kondisi koperasi di wilayah perdesaan Kabupaten Brebes, Banyumas, Pati, Tegal, Batang, dan Kudus yang memperlihatkan bahwa koperasi berpotensi menjadi instrumen penting dalam penguatan ekonomi masyarakat desa, meskipun tingkat keaktifan masih sangat bervariasi antar desa (...) Analisa komparasi di lakukan di wilayah Indoneisa lainnya dan beberapa negara. Hasil penelitian Arestis dan Phelps (2025) menunjukkan bahwa kehadiran koperasi keuangan di Brasil memiliki kaitan	99-139

No	Poin-poin Revisi	Respons	Halaman
	Hal ini menegaskan posisi studi dalam literatur global.	signifikan dengan penurunan tingkat kemiskinan di berbagai negara bagian selama periode 2012 hingga 2022. Semakin padat jaringan cabang koperasi keuangan di suatu wilayah, semakin rendah prevalensi dan keparahan kemiskinan di wilayah tersebut, khususnya untuk tingkat kemiskinan moderat. Dampak pengurangan kemiskinan ini lebih kuat dirasakan di daerah-daerah yang memiliki tingkat eksklusi sosial yang tinggi, struktur pekerjaan yang lebih lokal, serta infrastruktur pendidikan publik yang kurang berkembang, yang mencerminkan orientasi sosial dan kehadiran lokal koperasi tersebut (...)	
4	Kontribusi Ilmiah - Tegaskan bahwa penelitian ini memperluas konsep modal sosial dengan dimensi khas Indonesia (gotong royong, musyawarah). Ini bisa menjadi model konseptual baru.	Revisi dilakukan dengan menambahkan sub bab di bab 4 4.4 Logika Empiris Modal Sosial, Kemiskinan Desa, dan Peran Moderasi Pemerintahan Desa Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan desa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan modal sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, modal sosial direpresentasikan melalui empat dimensi utama, yaitu koperasi, musyawarah, partisipasi gotong royong, dan partisipasi menjaga lingkungan. Keempat dimensi tersebut terbukti memiliki hubungan signifikan dengan kemiskinan desa. Namun, arah pengaruh yang berbeda menunjukkan bahwa masing-masing dimensi modal sosial bekerja melalui mekanisme empiris yang tidak sama, sehingga interpretasinya perlu disesuaikan dengan konteks sosial, karakteristik indikator, dan arah koefisien yang dihasilkan dalam model (...)	139-145
	- Saran kebijakan harus lebih konkret. Misalnya, pemerintah desa perlu membangun forum musyawarah yang lebih inklusif,	Saran telah disesuaikan dengan tujuan penelitian dan lebih konkret	148

No	Poin-poin Revisi	Respons	Halaman
	atau memperkuat koperasi dengan dukungan regulasi dan akses permodalan. - Tambahkan rekomendasi yang bisa langsung diterapkan, seperti integrasi program pengentasan kemiskinan dengan kegiatan gotong royong desa.	1. Pemerintah desa perlu memperkuat modal sosial masyarakat melalui program yang lebih konkret dan terarah. Dalam aspek musyawarah, pemerintah desa perlu membangun forum musyawarah desa yang lebih inklusif dengan melibatkan kelompok miskin, perempuan, petani kecil, pelaku usaha mikro, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Forum ini tidak hanya menjadi kegiatan formal, tetapi perlu diarahkan untuk memetakan kebutuhan warga miskin, menentukan prioritas program penurunan kemiskinan, serta memastikan alokasi anggaran desa lebih tepat sasaran. Selain itu, partisipasi gotong royong dan menjaga lingkungan dapat diarahkan pada kegiatan padat karya desa, perbaikan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan, bank sampah, serta perbaikan fasilitas umum yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin. 2. Pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas program pengurangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran. Langkah nyatanya dapat dilakukan dengan memperbarui data keluarga miskin secara berkala, melakukan verifikasi data melalui musyawarah dusun, dan menyusun program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Pemerintah desa juga perlu mengalokasikan APBDes untuk program pemberdayaan ekonomi, bantuan modal produktif, pelatihan keterampilan, serta kegiatan padat karya desa. Agar pelaksanaannya lebih terukur, pemerintah desa dapat membentuk tim khusus pengentasan kemiskinan desa yang bertugas merancang program, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi hasil program secara terbuka kepada masyarakat. 3. Pemerintah desa perlu berperan aktif dalam memfasilitasi kekuatan sosial masyarakat dengan kebijakan pengurangan kemiskinan. Pemerintah desa dapat memperkuat koperasi desa dan BUMDes melalui dukungan regulasi desa, bantuan legalitas kelembagaan, pelatihan	

No	Poin-poin Revisi	Respons	Halaman
		pengelolaan koperasi, pendampingan usaha, akses permodalan, serta kerja sama pemasaran produk lokal. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Pemerintah desa juga perlu menjadikan hasil musyawarah inklusif sebagai dasar penyusunan APBDes, sehingga modal sosial yang ada di masyarakat dapat dimediasi melalui kebijakan desa yang lebih nyata dan berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan.	
5	Keterbatasan dan Agenda Riset Lanjutan - Jelaskan bahwa SEM-PLS berbasis data survei mungkin tidak menangkap dinamika sosial yang lebih kompleks. - Agenda riset lanjutan^[1] Usulkan penelitian kualitatif mendalam (misalnya etnografi desa) untuk melengkapi temuan kuantitatif, atau studi komparatif antarprovinsi.	Keterbatasan penelitian ini sebagai berikut. 1. Penelitian ini menggunakan data sekunder Potensi Desa (PODES) tahun 2018 dan 2020. Data PODES bersifat agregat karena disusun pada level desa/kelurahan, bukan pada level individu atau rumah tangga. Artinya, data ini menggambarkan kondisi umum suatu wilayah, seperti keberadaan koperasi, kegiatan musyawarah, partisipasi gotong royong, partisipasi menjaga lingkungan, pemerintahan desa, dan kondisi kemiskinan di desa. Karena data yang digunakan bersifat agregat, hasil penelitian ini hanya dapat menjelaskan hubungan antarvariabel pada tingkat desa/kelurahan. Hasil penelitian tidak dapat langsung digunakan untuk menjelaskan perilaku, pengalaman, atau kondisi setiap individu dan rumah tangga miskin di dalam desa. Dengan kata lain, jika suatu desa memiliki koperasi atau kegiatan gotong royong, hal tersebut belum tentu berarti seluruh masyarakat miskin di desa tersebut memperoleh manfaat yang sama. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu ditafsirkan secara hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam menarik kesimpulan dari data wilayah ke data individu. 2. Data PODES lebih banyak menggambarkan keberadaan fasilitas, kelembagaan, dan aktivitas di desa, tetapi belum menjelaskan kualitas dan	149

No	Poin-poin Revisi	Respons	Halaman
		efektivitasnya secara mendalam. Misalnya, data PODES dapat menunjukkan ada atau tidaknya koperasi, musyawarah desa, kegiatan gotong royong, atau partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan tetapi data PODES tidak menyediakan informasi kualitas dari koperasi tersebut. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kualitatif untuk melengkapi temuan kuantitatif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui etnografi desa, studi kasus, observasi lapangan, atau wawancara mendalam dengan perangkat desa, pengurus koperasi, tokoh masyarakat, kelompok miskin, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana koperasi, musyawarah, gotong royong, dan partisipasi menjaga lingkungan benar-benar berjalan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Penelitian kualitatif juga dapat membantu menjelaskan hal-hal yang tidak dapat ditangkap oleh data PODES. Misalnya, bagaimana proses pengambilan keputusan dalam musyawarah desa berlangsung, siapa saja yang benar-benar terlibat, apakah kelompok miskin memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, bagaimana koperasi membantu masyarakat miskin, serta bagaimana gotong royong dan kegiatan lingkungan berperan dalam menghadapi persoalan kemiskinan.	

TERIMA KASIH BANYAK ATAS MASUKAN, ARAHAN, DAN SARAN DARI BAPAK-BAPAK DAN IBU-IBU TIM PENGUJI KELAYAKAN DISERTASI DAN TIM PEMBIMBING DISERTASI